

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dan karena Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERPRES No.78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA KOTA BLITAR No. 3 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, susunan organisasi, Penjabaran Tugas Fungsi, Kelompok Jabatan fungsional, Mekanisme Pelaksanaan Tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Agustus 2024.
- Nama jabatan, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 106 Tahun 2022 Tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 19 Halaman.